



RAPBN 2018: Bekerja Bersama Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan

Jakarta, 16 Agustus 2017 – Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional dan pelaksanaan program Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2018 adalah (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antarwilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja.

Perekonomian nasional tahun 2018 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Untuk mengakselerasi perekonomian tahun 2018, Pemerintah akan merealisasikan belanja negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai prioritas dengan didukung oleh penerimaan negara yang optimal serta sumber pembiayaan yang terukur dan terkendali. Pemerintah akan terus meningkatkan penggunaan APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar terwujud keadilan sosial yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dicapai melalui peningkatan investasi yang akan terus didorong melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi, dengan penggunaan APBN sebagai katalis sekaligus pendorong pembangunan. Dengan demikian, tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018

RAPBN tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen;
2. Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada Rp13.500 per USD;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen;
5. *Indonesia Crude Price* (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD 48,0 per barel;
6. *Lifting* minyak dan gas bumi tahun 2018 masing-masing diperkirakan mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Besaran indikator ekonomi makro tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor: (1) faktor global, yaitu peningkatan kinerja ekspor dan impor, harga komoditas yang cenderung stagnan, serta limpahan (*spillover*) kebijakan negara-negara maju dan suasana geopolitik dan keamanan; dan (2) faktor domestik, yaitu tingkat kepercayaan dan daya beli konsumen, kondisi neraca dan likuiditas perbankan dalam negeri sebagai dampak program *Tax Amnesty*, serta meningkatnya investasi sebagai efek positif kenaikan peringkat *investment grade* dari ketiga lembaga rating Internasional yaitu Fitch, Moody's dan Standard and Poor.

Pokok-Pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2018

Rincian RAPBN tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendapatan negara tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp1.878,4 Triliun, terutama berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,4 Triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp267,9 Triliun. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan memanfaatkan momentum pelaksanaan perjanjian perpajakan internasional dengan mengefektifkan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, serta mencegah erosi perpajakan melalui pemindahan keuntungan (*Base Erosion Profit Shifting*). Sementara di bidang PNBP, dilakukan optimalisasi, baik di sektor migas, pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan kelestarian lingkungan.
- Pada sisi lain, belanja negara tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.204,4 Triliun, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.443,3 Triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761,1 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2018 akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, antara lain melalui (1) Bidang infrastruktur sebesar Rp409 Triliun, dengan sasaran pembangunan antara lain jalan baru sepanjang 856 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.761 m, jalur kereta api sepanjang 639 km'sp, serta rumah susun sebanyak 7.062 unit; (2) Bidang penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp292,8 Triliun, dengan sasaran antara lain berupa (i) subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton; (ii) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta rumah tangga sejahtera (RTS); (iii) Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa; (iv) Bantuan pangan melalui subsidi pangan dan bantuan pangan non tunai (BPNT) 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan arah perluasan cakupan BPNT; (v) Penyediaan bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 106,7 ribu KK; serta (vi) Bantuan uang muka dan suku bunga kredit rumah untuk kelompok berpenghasilan kecil. Upaya tersebut disinergikan juga dengan bidang-bidang lainnya yang menjadi prioritas nasional seperti pendidikan Rp440,9 Triliun dan kesehatan Rp110,2 Triliun.
- Sementara itu, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 Triliun dalam RAPBN tahun 2018 diarahkan untuk (i) meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; (ii) meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah; serta (iii) mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Adapun kebijakan dan *output* yang menjadi sasaran alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah (1) DAU: mengurangi ketimpangan kemampuan antardaerah dengan sasaran membaiknya indeks pemerataan menjadi 0,6308; (2) DAK Fisik antara lain untuk sarana dan prasarana 15.716 unit Puskesmas, irigasi 5.100 ha, rehabilitasi jaringan irigasi 771.850 ha, stimulan pembangunan perumahan baru 225.804 rumah tangga; (3) DAK non fisik: BOS 211,6 ribu sekolah, tunjangan profesi guru (TPG) 1,2 juta guru, dan bantuan operasional kesehatan 9.767 Puskesmas; (4) Dana Desa: meliputi 74.958 desa, rata rata Rp800,4 Juta per desa.
- Berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan rencana belanja negara tersebut, maka defisit anggaran pada RAPBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp325,9 Triliun (2,19 persen PDB) atau turun dibandingkan *outlook* APBN-P tahun 2017 sebesar 2,67 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer juga turun menjadi negatif Rp78,4 Triliun dari *outlook* tahun 2017 sebesar negatif Rp144,3 Triliun. Defisit anggaran tersebut akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai *fiscal sustainability*.

Pembiayaan anggaran tahun 2018 juga diarahkan untuk pembiayaan investasi, antara lain pembangunan infrastruktur (BLU LMAN Rp35,4 Triliun; PT KAI Rp3,6 Triliun; BLU Perumahan Rp2,2 Triliun) dan investasi jangka panjang sumber daya manusia pada BLU pendidikan Rp15,0 Triliun (termasuk *sovereign wealth fund*).

Postur ringkas RAPBN tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

APBNP 2017 dan RAPBN 2018
(triliun rupiah)

URAIAN	<i>Outlook</i> APBNP 2017	RAPBN 2018
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736,1	1.878,4
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.733,0	1.877,3
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472,7	1.609,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,2	267,9
II. PENERIMAAN HIBAH	3,1	1,2
B. BELANJA NEGARA	2.098,9	2.204,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.343,1	1.443,3
1. Belanja K/L	769,2	814,1
2. Belanja Non K/L	573,9	629,2
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	755,9	761,1
1. Transfer ke Daerah	697,7	701,1
2. Dana Desa	58,2	60,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(144,3)	(78,4)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(362,9)	(325,9)
% <i>Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	(2,67)	(2,19)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	362,9	325,9
I. PEMBIAYAAN UTANG	427,0	399,2
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59,7)	(65,7)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3,7)	(6,7)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,0)	(1,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,3	0,2

Info lebih lanjut hubungi:

Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Gedung Sutikno Slamet Lantai 18
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3505663; Fax (021) 3505659